

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN SOLOK  
TAHUN 2017**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Pelaporan keuangan Dinas Koperasi ,Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode laporan.Laporan ini digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,realisasi anggaran ,saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu ekuitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil – hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami penurunan atau kenaikan akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 khususnya bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara.
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
12. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 Tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
14. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017.

### 1.3 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan – ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2017 meliputi hal – hal sebagai berikut :

Bab I	PENDAHULUAN	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab II	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA SKPD	
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

		yang telah ditetapkan.
Bab III	PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN	
	3.1	Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
		3.1.1 Pendapatan- LRA
		3.1.2 Belanja
		3.1.3 Transfer ( khusus untuk SKPKD )
		3.1.4 Pembiayaan ( khusus untuk SKPKD )
		3.1.5 Pendapatan-LO
		3.1.6 Beban
		3.1.7 Aset
		3.1.8 Kewajiban
		3.1.9 Ekuitas Dana
	3.2	Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.
Bab IV	PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN	
Bab V	P E N U T U P	